



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIATNA
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 411280

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 853.351.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m²/70 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 409.970.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 86.013.000
3. Tanah Seluas 134 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 26.800.000
4. Tanah Seluas 932 m² di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 25.164.000
5. Tanah Seluas 1335.6 m² di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 55.404.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m²/36 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 14.600.000

1. MOTOR, HONDA YAMAHA MIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 20.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 66.706.327

F. HARTA LAINNYA

Rp. 196.491.344

Sub Total

Rp. 1.151.648.671



III. HUTANG

Rp.

4.041.468

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.147.607.203

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.